

Pengaruh Perencanaan Penganggaran dan *E-Procurement* terhadap Penyerapan Anggaran

Ade Frankoe¹⁾, Kamaludin²⁾, Fadli³⁾

Mahasiswa PS Magister Manajemen, Universitas Bengkulu¹⁾

Dosen PS Magister Manajemen, Universitas Bengkulu^{2),3)}

Abstract. The purpose of this study was to determine the effect of planning and procurement of goods and services on the absorption of the Regional Budget. The data used in this study are primary data obtained from the results of distributing questionnaires in Bangka Belitung and Lampung provinces. Number of samples is 192 respondents from 66 the Local Government Organizations of Bangka Belitung and Lampung Provinces. The data analysis method used is descriptive analysis and regression analysis. The results obtained are: (1) Budget planning has a positive and significant effect on budget absorption in Lampung Province and Bangka Belitung Province. This result means that the more planned the activity budget in each SKPD / OPD, the higher the absorption of the budget; and (2) E-Procurement has a positive and significant effect on budget absorption in Lampung Province and Bangka Belitung Province. This result means that the better the implementation of e-procurement (procurement of goods and services) in each SKPD / OPD, the higher the budget absorption.

Keywords: Budgeting Planning, e-Procurement and Budget Absorption.

Pendahuluan

Ketentuan perundang-undangan tersebut telah meletakkan otonomi daerah secara penuh, luas dan bertanggungjawab bagi daerah otonomi. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerah demi memajukan daerahnya. Pendelegasian wewenang yang luas dari pusat ke daerah berdampak semakin tingginya tuntutan masyarakat, yakni adanya peningkatan mutu layanan publik yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang baik sebagai dampak dari pemberlakuan otonomi daerah, setiap daerah harus melakukan pengelolaan daerah sebaik mungkin dengan melaksanakan aspek-aspek tata kelola yang baik (*good government/good governance*).

Anggaran merupakan salah satu motor penggerak yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut Suhartono (2011) anggaran merupakan dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan anggaran negara/daerah yang disusun setiap tahunnya oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan. Oleh karena itu APBN dan APBD mempunyai peran yang sangat penting karena menjadi alat utama bagi Negara untuk mensejahterakan masyarakat.

Sistem pengelolaan anggaran negara/daerah telah mengalami banyak perubahan. Sebelumnya di Indonesia menggunakan sistem penganggaran tradisional (*line item budgeting*) di mana anggaran dipisahkan atas belanja rutin dan pembangunan. Fokus anggaran adalah *input*, peningkatan pagu anggaran kurang menekankan pada *output* dan kurang mempertimbangkan prioritas kebijakan nasional. Proses pelaksanaan penganggaran tradisional dapat menimbulkan duplikasi belanja, penumpukan, dan penyimpangan anggaran (Herriyanto, 2010). Selain itu, pelaksanaan anggaran tradisional tidak memiliki tolok ukur yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja dan diyakini kurang transparan dan akuntabel.

Seiring semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi tata kelola penganggaran sektor publik, maka dibuat dan disahkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut merupakan paket undang-undang reformasi manajemen keuangan sektor publik, yang menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan praktik-praktik penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan *e-Procurement* yang berlaku secara internasional.

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan prinsip-prinsip *e-Procurement* dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan agensi dan asimetri informasi. Leruth dan Paul (2007) mengungkapkan korupsi dan buruknya pengelolaan pengeluaran pemerintah karena adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara pihak yang melaksanakan tugas (*agents*) dan pemangku kepentingan yang memiliki tugas untuk dikerjakan (*principles*). Leruth dan Paul (2007) memodelkan kementerian keuangan bertindak sebagai *principles* yang menyediakan dana kepada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan serangkaian kegiatan. Hubungan antara kementerian keuangan (MoF) dan K/L sebagai permasalahan agensi terkait asimetri informasi, tidak hanya terhadap parameter-parameter eksternal tetapi juga terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama bagi *principles* adalah bagaimana mendesain kontrak yang paling efisien untuk memacu kinerja K/L sebagaimana yang diharapkan.

Fenomena yang terjadi saat ini, di beberapa lembaga negara maupun lembaga daerah pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja masih sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya keterlambatan penyerapan dana anggaran lembaga dan satuan kerja lainnya masih sering terjadi (Dirjen Perbendaharaan, 2017). Menurut Dirjen Perbendaharaan (2017), pola penyerapan anggaran baru dipacu pada semester kedua yaitu tepatnya pada triwulan IV. Pada akhir Semester I tiap tahun nyarata-rata terjadi penyerapan anggaran sebesar 36% yang masih jauh dari kondisi idealnya yakni sebesar 100%. Sementara menjelang akhir tahun anggaran, penyerapan anggaran terkesan dipaksakan, sehingga banyak kegiatan yang menumpuk.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh perencanaan penganggaran terhadap penyerapan anggaran?

2. Bagaimanakah pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan penyerapan anggaran?

Studi Sebelumnya

Untuk memperbanyak pemahaman teoritis sebagai bahan masukan dan rujukan dalam penulisan ini, maka penulis membuat ringkasan penelitian sebelumnya yang variabelnya berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Telah banyak penelitian terdahulu yang dilakukan berkaitan dengan perencanaan penganggaran, *e-procurement* dan penyerapan anggaran pada organisasi publik. Hasil-hasil tersebut sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tujuan Penelitian	Hasil
1	Siswanto dan Rahayu (2010)	Rendahnya penyerapan belanja atas tujuh kementerian/lembaga (K/L) terbesar pengelola belanja yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja yaitu: faktor internal, faktor mekanisme barang dan jasa, faktor dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, dan faktor lainnya
2	Herryanto (2010)	Faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta atas 97 variabel	Dengan menggunakan analisis faktor, dihasilkan lima faktor utama yang terbentuk yaitu faktor perencanaan, Administrasi, SDM, Dokumen Pengadaan, dan Ganti Uang Persediaan.
3	Kuswoyo (2011)	Faktor-faktor penyebab terjadinya penumpukan penyerapan anggaran belanja di akhir tahun anggaran pada satuan kerja di wilayah KPPN Kediri	faktor-faktor penyebab terjadinya penumpukan penyerapan anggaran belanja di akhir tahun anggaran pada satuan kerja di wilayah KPPN Kediri
4	Miliasih (2012)	Analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian negara/lembaga TA 2010 di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru	Penelitian dilakukan dengan statistika deskriptif menghasilkan dua faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja yaitu kebijakan teknis dan kultur pengelolaan anggaran di satuan kerja.

No	Nama	Tujuan Penelitian	Hasil
5	Manasan & Mercado (2001)	Rendahnya penyerapan anggaran di lingkungan lembaga pemerintah terjadi karena tiga faktor, yakni faktor internal lembaga, faktor sistem anggaran dan faktor koordinasi yang lemah.	Rendahnya penyerapan anggaran di lingkungan lembaga pemerintah terjadi karena tiga faktor, yakni faktor internal lembaga, faktor sistem anggaran dan faktor koordinasi yang lemah.
6	Rumaini <i>et al.</i> (2018)	Serapan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa serapan anggaran belanja berdasarkan jenis belanja, fungsi dan organisasi berfluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata serapan anggaran dari tahun 2012 sampai dengan 2015 berdasarkan jenis belanja sebesar 87,03%, rata-rata serapan belanja berdasarkan fungsi sebesar 93,32%, dan rata-rata serapan belanja berdasarkan organisasi sebesar 94,44%.

Tinjauan Pustaka

Pendekatan Konsep

Stewardship Theory merupakan salah satu teori dalam akuntansi yang muncul sejalan dengan adanya perkembangan akuntansi yang merambah pada disiplin ilmu lainnya. *Stewardship Theory* berangkat dari perspektif pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teori-teori psikologis dan sosiologis. Dalam pengelolaan *Stewardship Theory* pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama. *Stewardship Theory* dalam akuntansi menjelaskan sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi antara *shareholder* dan manajemen atau dapat pula hubungan antara top manajemen dengan para manajer di bawahnya dalam sebuah organisasi dengan mekanisme situasional yang mencakup filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi dan kepemimpinan dalam mencapai tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing.

Penyerapan Anggaran

Penyerapan Anggaran memperlihatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak didasari prinsip efektivitas dan efisiensi. Di sisi lain, penumpukan pencairan dana di akhir tahun memperlihatkan bahwa pemerintah daerah masih menggunakan indikator penganggaran tradisional yang lebih memperhatikan penyerapan anggaran daripada capaian kinerja. Padahal, per tahun 2005 pemerintah sudah berkomitmen untuk menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada *output* yang memperhatikan visi, misi dan tujuan organisasi sehingga sindrom akhir tahun yang memperlihatkan tren penumpukan pencairan dana di akhir tahun bisa jadi sekedar gejala yang berasal dari masalah yang lebih mendasar.

Anggaran publik merupakan perangkat penting untuk memenuhi harapan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009) kinerja sektor publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa banyak yang telah dicapai. Dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah adalah salah satu elemen untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sukirno, 2010). Belanja pemerintah terutama pengeluaran barang dan jasa serta pengeluaran pembangunan lainnya merupakan salah satu komponen utama yang membentuk PDRB atau GDP (Yustika, 2012).

Perencanaan Penganggaran

Perencanaan penganggaran daerah merupakan elemen penting di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah (PKD). Oleh karena itu, untuk memahami seluk-beluk aktivitas perencanaan penganggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat kita pahami mengingat manajemen keuangan di sektor pemerintahan lebih mengedepankan pada aspek ketaatan terhadap peraturan dengan tujuan akhir yaitu memaksimalkan kemakmuran rakyat (*stakeholders*), berbeda dengan manajemen keuangan di sektor privat yang selalu

mengedepankan aspek teori dan pendekatan *the best practice* dengan tujuan akhir yaitu memaksimalkan perolehan laba bagi para pemiliknya (*stockholders*).

Sejak bergulirnya era otonomi daerah telah dilakukan pula reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara baru bergulir sejak ditetapkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian disusul dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*E-Procurement*)

Pengadaan barang/jasa publik, atau pembelian pemerintah dari sektor swasta, telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Gershon (1999) mendefinisikan pengadaan sebagai keseluruhan proses perolehan dari pihak ketiga mencakup barang, jasa dan proyek-proyek konstruksi. Proses ini meliputi seluruh siklus dari konsep awal serta mendefinisikan kebutuhan sampai dengan akhir masa manfaat suatu aset atau selesainya kontrak. Faktor utama serta prinsip yang mendasari sistem pengadaan barang dan jasa publik yang modern adalah persaingan terbuka, tidak terbatas serta akses yang luas ke pasar pengadaan. Selain itu, proses pengadaan mulai dari seleksi peserta tender, prosedur tender, dan penetapan pemenang, harus terbuka dan dapat dilihat oleh umum, sehingga membuatnya menjadi proses yang transparan. Ini merupakan suatu tanggung jawab bagaimana membuat cara yang paling efisien untuk setiap pengadaan di kementerian maupun di daerah mengingat pengadaan tersebut dibiayai menggunakan uang dari para pembayar pajak. Untuk menyempurnakan keseluruhan transparansi proses pengadaan barang dan jasa termasuk kontrak pengadaan tersebut, unit-unit pengawasan baik dari internal maupun eksternal juga harus berperan aktif termasuk juga dari pihak media.

Terbuka dan kompetitifnya suatu proses pengadaan sampai dengan kontrak dimulai dari beberapa prosedur; dari sisi pemerintah harus mendeskripsikan

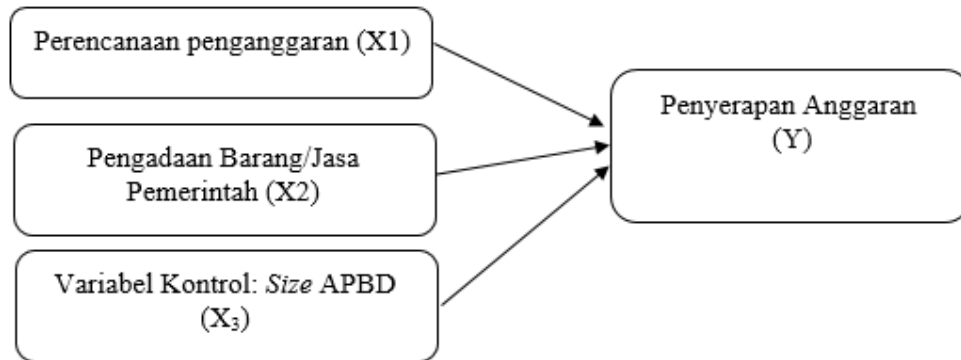
persyaratan yang mesti penyedia penuhi untuk menunjukkan apakah kemampuan mereka memenuhi dari yang dipersyaratkan. Pemerintah kemudian mengidentifikasi calon penyedia dan mengundang mereka untuk mengajukan penawaran. Proses pengadaan juga harus menjamin bahwa penyedia dapat memenuhi spesifikasi dari kualitas produk yang diinginkan dan ketepatan waktu penyelesaiannya. Dalam kasus kontrak jangka panjang, penyedia juga harus dapat menjamin kontinuitas daripasokan.

Kerangka Analisis

Sekaran (2006) mengemukakan bahwa kerangka analisis merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *Stewardship Theory* yang berangkat dari perspektif pemikiran akuntansi manajemen didasari teori-teori psikologis dan sosiologis. Aplikasi teori *stewardship* pada pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara *principles* (dalam hal ini pemilik negara adalah rakyat) dengan *steward* (dalam hal ini pemerintah dengan lembaga negara) dalam mencapai tujuan yang diharapkan bersama. *Stewardship theory* menjelaskan sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi antara manajemen *steward* dengan *principal* dengan mekanisme dan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah melihat pengaruh perencanaan dan penganggaran dan aktivitas manajemen dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap penyerapan anggaran keuangan pemerintah daerah, hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah akan dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam membuat rencana dan program kerja untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan amanat perundang-undangan. Aturan perundang-undangan dan kebijakan dalam tata kelola pemerintah daerah tersebut akan memberikan panduan dan pedoman kepada daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Dari pemaparan di atas, maka kerangka analisis pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut



Gambar 1
Kerangka Analisis

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jawaban tersebut baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016). Hipotesis juga didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan dapat ditemukan sebuah solusi terhadap sebuah masalah (Sekaran, 2009).

Pada penelitian, hipotesis alternative (H_a) dikembangkan dari konsep utama dan hasil studi empiris yang memperkuat konsep utama, yakni pengaruh perencanaan penganggaran dan *e-procurement* terhadap kinerja karyawan. Pemaparan hipotesis alternatif dipaparkan berikut ini.

H₁ : Perencanaan penganggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

H₂ : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

H₃ : *Size* anggaran APBD berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini Karakteristik responden dapat dilihat dengan form isian dalam kuesioner yang terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja. Berdasarkan informasi dari pengisian form responden tersebut, dapat diketahui karakteristik responden sebagaimana terangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. **Karakteristik Demografi Responden**

Karakteristik Demografi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
<u>Umur</u>		
≤ 30 Tahun	5	2,6
31 – 35 Tahun	25	13,0
36 – 40 Tahun	67	34,9
41 – 45 Tahun	60	31,3
> 45 Tahun	35	18,2
Jumlah Responden	192	100
<u>Jenis Kelamin</u>		
Laki-laki	128	66,7
Perempuan	64	33,3
Jumlah Responden	192	100
<u>Pendidikan Terakhir</u>		
Diploma (DIII)	15	7,8
Sarjana (S1)	146	76,0
Pascasarjana (S2)	31	16,1
Jumlah Responden	192	100
<u>Lama Bekerja</u>		
≤ 10 Tahun	19	9,9
11 – 15 Tahun	86	44,8
16 – 20 Tahun	34	17,7
> 20 Tahun	53	27,6
Jumlah Responden	192	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia lebih besar dari 45 tahun. Urutan kedua adalah responden dengan usia 36-40 tahun, disusul responden dengan usia antara 41-45 tahun. Dengan melihat usia responden tersebut, responden penelitian dimungkinkan dapat memahami dan mampu mengelola keuangan daerah dengan baik.

Selanjutnya, dari jenis kelaminnya, responden penelitian didominasi oleh responden laki-laki yakni sebanyak 128 orang atau sebesar 66,7 persen. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa responden laki-laki banyak dibandingkan responden perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai responden didominasi oleh pegawai laki-laki. Walaupun demikian, dalam kegiatan organisasi dibutuhkan pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan kerja, misalnya dalam menyusun Rencana Kerja (RK) secara tepat, oleh karena itu setiap pegawai laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama, jika memiliki kemampuan yang dibutuhkan tersebut.

Dari sisi pendidikannya, responden penelitian telah memiliki pendidikan yang baik. Hal ini terlihat dari jenjang pendidikan sarjana sebanyak 146 orang (76 persen). Kemudian disusul responden dengan tingkat pendidikan pascasarjana (16,1 persen) dan diploma (7,8) persen. Tingkat pendidikan yang sudah memadai yang dimiliki oleh responden tersebut dapat berguna dalam mendukung tugas perencanaan, karena seseorang yang sudah berpendidikan sarjana, dinilai lebih kompeten dibandingkan dengan pegawai yang belum sarjana. Dalam Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2003 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan dan fungsi tertentu harus memiliki kompetensi teknis dan kompetensi bidang yang memadai.

Lamanya responden yang bekerja di bagian perencanaan didominasi oleh pegawai yang sudah berpengalaman. Rata-rata pegawai telah bekerja antara 11-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai telah memahami mengenai proses dan pelaksanaan tugas di OPD, sehingga mampu mendukung mampu menyusun rencana anggaran dengan baik dan tepat. Selain itu, pengalaman kerja menjadi acuan untuk melaksanakan tugas pada OPD yang lebih baik di masa-masa mendatang.

2. Hasil Analisis Data

Analisis Regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh secara bersama-sama dan parsial antara variabel independen terhadap dependen.

Berdasarkan estimasi regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 207,0 *for Windows*, seperti terangkum pada tabel 2.

Tabel 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t	Sig.	Dimensi	Koefisien Regresi	Nilai t	Sig.
- Perencanaan Penganggaran	0,129	3,057	0,003	- Program Kerja	0,146	2,538	0,014
- <i>e-Procurement</i>	0,128	4,923	0,000	- Anggaran Kerja	0,225	2,865	0,006
- <i>Size APBD</i>	4,290E-12	1,199	0,235*	- Efisiensi	0,186	5,260	0,000
				- Aman	-0,016	-0,224	0,823*
				- Terbuka	-0,013	-0,195	0,846*
				- Bersaing	0,041	2,023	0,048
				- Adil	0,061	2,130	0,038
				- Akuntabel	0,363	3,671	0,001
				- <i>Size APBD</i>	1,376E-12	0,478	0,634*
Konstanta (β_0)	: -0,941			Konstanta (β_0)	: 0,970		
Korelasi (R)	: 0,642			Korelasi (R)	: 0,837		
Determinasi (R^2)	: 0,412			Determinasi (R^2)	: 0,700		
Uji F	: 14,461			Uji F	: 14,543		
Sig.	: 0,000			Sig.	: 0,000		
N	: 66			N	: 66		

Sumber: Hasil Penelitian 2020, diolah

*) Tidak signifikan (sig. > 0,05).

Dari rangkuman *output* analisis regresi sebagaimana terlihat pada Tabel 2 diperoleh persamaan regresi secara umum adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,941 + 0,129X_1 + 0,128X_2 + 4,290E-12X_3$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: *Pertama*, nilai koefisien regresi variabel perencanaan penganggaran (b_1) sebesar 0,129 menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar 0,129. Artinya, jika semakin baik perencanaan penganggaran yang dipersepsikan oleh pegawai, maka penyerapan anggaran pemerintah daerah akan semakin baik. *Kedua*, nilai koefisien regresi variabel *e-Procurement* sebesar 0,128 menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-Procurement* memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar 0,128. Artinya, jika semakin baik pelaksanaan *e-Procurement* yang dipersepsikan oleh pegawai, maka penyerapan anggaran pemerintah daerah akan semakin baik. *Ketiga*, nilai koefisien regresi variabel *size APBD* sebesar 4,290E-12 menunjukkan bahwa ukuran APBD tiap-tiap OPD memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar 4,290E-12. Artinya, jika besar ukuran APBD tiap-tiap OPD, maka penyerapan anggaran pemerintah daerah akan semakin tinggi (meningkat).

Selanjutnya, dari rangkuman *output* analisis regresi juga diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,412. Hasil ini menjelaskan bahwa kemampuan variabel perencanaan penganggaran, *e-Procurement* dan *size APBD* dalam menjelaskan variasi

peningkatan atau penurunan penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar 41,2%, sedangkan sisanya 58,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kemudian, jika dilihat berdasarkan level dimensi, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,970 + 0,146X_{1_1} + 0,225X_{1_2} + 0,186X_{2_1} - 0,016X_{2_2} - 0,013X_{2_3} + 0,041X_{2_4} + 0,061X_{2_5} + 0,363X_{2_6} + 1,376E - 12X_3$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi dimensi program kerja (β_1) sebesar 0,146 menunjukkan bahwa program kerja yang direncanakan memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar 0,146. Artinya, jika semakin baik perencanaan program kerja, maka penyerapan anggaran pemerintah daerah akan semakin baik.
2. Nilai koefisien regresi dimensi anggaran biaya (β_2) sebesar 0,225 menunjukkan bahwa anggaran biaya yang direncanakan memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar 0,225. Artinya, jika semakin baik perencanaan anggaran biaya, maka penyerapan anggaran pemerintah daerah akan semakin baik.
3. Nilai koefisien regresi dimensi efisiensi (β_3) sebesar 0,186 menunjukkan bahwa efisiensi dalam *e-procurement* memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar 0,186. Artinya, jika semakin baik efisiensi dalam *e-procurement*, maka penyerapan anggaran pemerintah daerah akan semakin baik.
4. Nilai koefisien regresi dimensi aman (β_4) sebesar -0,016 menunjukkan bahwa keamanan dalam *e-procurement* berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar -0,016.
5. Nilai koefisien regresi dimensi terbuka (β_5) sebesar -0,013 menunjukkan bahwa keterbukaan dalam *e-procurement* berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar -0,013.
6. Nilai koefisien regresi dimensi bersaing (β_6) sebesar 0,041 menunjukkan bahwa persaingan dalam *e-procurement* memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar 0,041. Artinya, jika semakin baik persaingan dalam *e-procurement*, maka penyerapan anggaran pemerintah daerah akan semakin baik.

7. Nilai koefisien regresi dimensi adil (β_7) sebesar 0,061 menunjukkan bahwa keadilan dalam *e-procurement* memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar 0,041. Artinya, jika semakin baik adil pelaksanaan *e-procurement*, maka penyerapan anggaran pemerintah daerah akan semakin baik.
8. Nilai koefisien regresi dimensi akuntabel (β_8) sebesar 0,363 menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam *e-procurement* memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar 0,363. Artinya, jika semakin baik akuntabel pelaksanaan *e-procurement*, maka penyerapan anggaran pemerintah daerah akan semakin baik.
9. Nilai koefisien regresi variabel *size* APBD (β_9) sebesar 1,376E-12 menunjukkan bahwa ukuran APBD berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar 1,376E-12.

Selanjutnya, dari rangkuman *output* analisis regresi juga diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,700. Hasil ini menjelaskan bahwa kemampuan variabel dimensi-dimensi variabel perencanaan penganggaran, dimensi-dimensi variabel *e-Procurement* dan *size* APBD dalam menjelaskan variasi peningkatan atau penurunan penyerapan anggaran pemerintah daerah sebesar 70%, sedangkan sisanya 30% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

1. Pengaruh Perencanaan Penganggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis diketahui bahwa perencanaan penganggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah. Hasil ini memberi indikasi bahwa semakin baik perencanaan penganggaran, maka penyerapan anggaran APBD semakin tinggi. Artinya, jika anggaran direncanakan dengan baik, maka tentu saja sangat mudah dalam menggunakan dan menyerap anggaran dengan baik.

Berpengaruhnya perencanaan penganggaran terhadap penyerapan anggaran sesuai dengan pendapat Halim (2007) bahwa perencanaan penganggaran adalah salah satu faktor penentu penyerapan anggaran. Lebih lanjut Halim (2007) menjelaskan bahwa rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan lemahnya

perencanaan anggaran. Lemahnya perencanaan penganggaran dapat diidentifikasi dari banyaknya revisi-revisi anggaran sehingga merubah jadwal kegiatan. Kondisi ini tentu saja akan mengakibatkan penumpukkan anggaran di akhir tahun (Halim, 2007).

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Stewardship Theory* yang berangkat dari perspektif pemikiran akuntansi manajemen didasari teori-teori psikologis dan sosiologis. Aplikasi teori *stewardship* pada pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara *principles* (dalam hal ini pemilik negara adalah rakyat) dengan *steward* (dalam hal ini pemerintah dengan lembaga negara) dalam mencapai tujuan yang diharapkan bersama. *Stewardship theory* menjelaskan sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi antara manajemen *steward* dengan *principal* dengan mekanisme dan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah akan dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam membuat rencana dan program kerja untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan amanat perundang-undangan. Aturan perundang-undangan dan kebijakan dalam tata kelola pemerintah daerah tersebut akan memberikan panduan dan pedoman kepada daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2011) dan Adi (2013) yang memberi bukti bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Terserapnya anggaran maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya penumpukkan anggaran di akhir tahun.

Faktor perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan anggaran daerah merupakan faktor penting berkaitan dengan upaya penyerapan anggaran. Faktor perencanaan dan kebijakan yang dimaksud adalah adanya rencana anggaran tidak diblokir, perencanaan sesuai kebutuhan, penelaahan dan revisi anggaran, desakan dan dorongan masyarakat dan mekanisme yang baik. Hal-hal tersebut membantu

pengelola anggaran keuangan OPD terdorong untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran dengan baik.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut pandangan ahli ekonomi bahwa peranan anggaran sangat menentukan bagi berkembangnya suatu organisasi perusahaan, yang berarti dapat meningkatkan keuntungan bagi pemiliknya. Lain halnya menurut ahli Administrasi Negara, anggaran negara merupakan cara pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara untuk membiayai program-program negara, berbeda dari sudut pandang ahli ekonomi yang berorientasi dengan keuntungan, para Administrasi Negara memandang bahwa dengan anggaran maka program-program pemerintah akan berjalan, demikian pula besar kecilnya anggaran juga memengaruhi keberhasilan program-program pemerintah.

Menurut Welsch dalam Adhim (2008) anggaran adalah suatu bentuk statement daripada rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk dalam periode itu. Sedangkan menurut Marsono (dalam Eka, 2011) anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggitingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009: 62), anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Sedangkan Menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA), saat ini *Governmental Accounting Standarts Board* (GASB), definisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang

mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP, 2005: 104) yang dimaksud dengan anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

2. Pengaruh *E-Procurement* terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis diketahui bahwa *e-procurement* atau pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah. Hasil ini memberi indikasi bahwa semakin baik *e-procurement*, maka penyerapan anggaran APBD semakin tinggi. Proses *e-procurement* yang tepat, akan mempermudah SKPD dalam merealisasikan dan menggunakan anggaran secara baik.

Aspek atau dimensi variabel *e-procurement* yang mendukung pelaksanaan penyerapan anggaran di SKPD antara lain efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; kondisi persaingan dalam pengadaan barang dan jasa; keadilan dalam pengadaan barang dan jasa; serta akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Keempat dimensi tersebut jika dijalankan secara memadai, maka akan dapat mempercepat proses penyerapan anggaran di SKPD baik di Provinsi Lampung maupun Provinsi Bangka Belitung.

Berpengaruhnya pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran sesuai dengan pendapat Halim (2007) bahwa pengadaan barang dan jasa adalah salah satu faktor penentu penyerapan anggaran. Dalam penjelasan yang lebih spesifik, Halim (2007) menjelaskan bahwa rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan lambannya proses tender. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, karena menunggu proses *tender* selesai. Hal yang akan terjadi adalah kegiatan akan terlambat dilaksanakan, bahkan dapat menumpuk di akhir tahun.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan *Stewardship Theory* di mana pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara *principles* (dalam hal ini pemilik negara adalah rakyat) dengan *steward* (dalam hal ini pemerintah dengan lembaga negara) dalam mencapai tujuan yang diharapkan bersama. *Stewardship theory* menjelaskan sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi antara manajemen *steward* dengan *principal* dengan mekanisme dan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah akan dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam membuat rencana dan program kerja untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan amanat perundang-undangan. Aturan perundang-undangan dan kebijakan dalam tata kelola pemerintah daerah tersebut akan memberikan panduan dan pedoman kepada daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi (2013) dan Herryanto (2012) yang memberi bukti bahwa proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Terserapnya anggaran maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya penumpukkan anggaran di akhir tahun. Proses pengadaan barang dan jasa memerlukan proses yang cukup panjang, sehingga memerlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan.

Penyerapan anggaran juga disebabkan karena faktor pengadaan barang/jasa pemerintah, di mana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pemerintah Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung sudah menerapkan sistem *e-procurement* sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil penelitian Adi (2013) menyebutkan bahwa faktor pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja.

Berkait dengan upaya pengadaan barang/jasa pemerintah, ketepatan jadwal menentukan dalam penyerapan anggaran. Saat ini pemerintah menerapkan

program pengadaan barang/jasa secara elektronik *procurement* yang disingkat dengan *e-procurement* sebagai suatu sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet/*web*. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelajaan uang negara.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, fair dan partisipatif mendukung persaingan usaha yang semakin sehat di setiap wilayah dimana pengadaan barang /jasa dilakukan. Tidak ada pengaturan pemenang lelang serta menghilangkan sistem arisan antara pelaku usaha, pelaku usaha yang besar tidak dapat menekan pelaku usaha kecil untuk tidak berpartisipasi dalam tender, serta pelaku usaha di semua tingkatan tidak dapat menekan lembaga pemerintah untuk memenangkannya dalam tender. Pelaksanaan lelang diatur dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan meniadakan kontak langsung antara panitia dengan penyedia barang/jasa. Pelaku usaha yang unggul dalam melakukan efisiensi terhadap seluruh aktifitas operasional usahanya akan mendapatkan keunggulan kompetitif.

Terbuka dan kompetitifnya suatu proses pengadaan sampai dengan kontrak dimulai dari beberapa prosedur; dari sisi pemerintah harus mendeskripsikan persyaratan yang mesti penyedia penuhi untuk menunjukkan apakah kemampuan mereka memenuhi dari yang dipersyaratkan. Pemerintah kemudian mengidentifikasi calon penyedia dan mengundang mereka untuk mengajukan penawaran. Proses pengadaan juga harus menjamin bahwa penyedia dapat memenuhi spesifikasi dari kualitas produk yang diinginkan dan ketepa tan waktu penyelesaiannya. Dalam kasus kontrak jangka panjang, penyedia juga harus dapat menjamin kontinuitas dari pasokan.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka perlu adanya perbaikan mekanisme pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman pengadaan barang/jasa. Setiap instansi wajib mengumumkan seluruh rencana pengadaan setiap awal tahun anggaran,

kecuali pekerjaan yang bersifat rahasia, di *website* pengadaan nasional. Koordinasi untuk pelaksanaan pengumuman rencana pengadaan dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP).

Implikasi Strategis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Daerah Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung. Permasalahan penyerapan anggaran yang rendah dan digenjot di akhir tahun merupakan masalah ‘laten’ yang terjadi di setiap lembaga baik di pusat maupun di daerah. Walaupun mekanisme dan pengelolaan anggaran telah dimodifikasi serta telah dibentuk Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPPRA), namun masalah tersebut belum juga teratasi, termasuk di Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.

Berkaitan dengan hasil tersebut, maka implikasi strategis dalam upaya meningkatkan penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan penganggaran yang matang merupakan aspek yang sangat penting agar anggaran dapat terserap dengan baik, baik dari sisi waktu maupun target anggaran. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dalam perencanaan penganggaran sehingga rencana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tiap-tiap OPD adalah rencana yang *fix* (tidak berubah-ubah). Jika rencana anggaran berubah-ubah, maka penyerapan anggaran tidak akan berjalan lancar. Perbaikan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dari seluruh komponen dinas/instansi daerah yang tinggi diperlukan untuk mendukung terlaksananya penyerapan anggaran khususnya di Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.
- b) Secara umum pengadaan barang dan jasa pemerintah turut mempengaruhi penyerapan anggaran. Beberapa aspek penting dalam pengadaan barang dan jasa adalah efisiensi, bersaing, adil dan akuntabel. Oleh karena itu, pelaksanaan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa memerlukan upaya manajemen yang baik, terutama dalam hal ketepatan waktu dan ketepatan

jadwal pelaksanaan, sehingga proses penyerapan anggaran berjalan dengan lancar. Perbaikan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dari seluruh komponen dinas/instansi daerah yang tinggi diperlukan untuk mendukung terlaksananya penyerapan anggaran khususnya di Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.

- c) Penyerapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, perlu peningkatan kinerja ekonomi dan kinerja birokrasi pemerintah Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung, terutama dalam pembangunan infrastruktur daerah dalam memajukan kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung yang tercermin dari penyerapan anggaran. Sebaliknya, anggaran yang tidak terserap dengan baik, tentu saja akan menghambat proses pembangunan, terhambatnya proses pelayanan publik, program pengentasan kemiskinan akan terhambat dan terhambatnya program-program sosial ekonomi lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung, yang berarti bahwa semakin terencana anggaran kegiatan di tiap-tiap SKPD/OPD, maka penyerapan anggaran semakin tinggi. Seluruh dimensi variabel perencanaan penganggaran yang terdiri dari perencanaan program kerja dan perencanaan anggaran biaya berpengaruh positif terhadap tingginya penyerapan anggaran keuangan pemerintah daerah.
- 2) *E-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung, yang berarti bahwa semakin baik pelaksanaan e-procurement (pengadaan barang dan jasa) di tiap-tiap SKPD/OPD, maka penyerapan anggaran semakin tinggi. Dimensi -

dimensi variabel *e-procurement* yang mendukung pelaksanaan penyerapan anggaran di SKPD antara lain efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; kondisi persaingan dalam pengadaan barang dan jasa; keadilan dalam pengadaan barang dan jasa; serta akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Keempat dimensi tersebut jika dijalankan secara memadai, maka akan dapat mempercepat proses penyerapan anggaran di SKPD baik di Provinsi Lampung maupun Provinsi Bangka Belitung.

- 3) *Size* APBD tiap-tiap OPD tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa besar atau kecilnya APBD masing-masing OPD, tidak mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan adalah sebagai berikut:

1. Pada perencanaan penganggaran, setiap pengelola keuangan di tiap-tiap OPD harus memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pengelolaan anggaran yang baik, hal ini dikarenakan masalah penyerapan anggaran adalah rutin.
2. Pada faktor pengadaan barang dan jasa diperlukan upaya perbaikan terkait dengan ketepatan waktu dalam pengadaan barang dan jasa, ketepatan pemilihan rekanan dan ketepatan dalam jadwal kegiatan. Hal ini tentu saja akan mendorong peningkatan penyerapan anggaran.

Daftar Pustaka

- Adhim, M.N. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang)*. Jurnal Ilmiah Program Studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
- Adi, P.P. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Jurnal Ilmiah Program Studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Malang.
- Azwar, S. (2003). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bappenas (2012). *Penyerapan Anggaran Tingkat Kementrian di Indonesia*, Jakarta.
- Basuki (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Blili, S. & Raymond, L. (1994). Information Technology: Threats and Opportunity for Small and Medium Size Entreprises, *International Journal of Information and Management*, 13(1): 439-448.
- Cardisiawan (2009). *Mengungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah*. (Online). Tersedia di World Wide Web:
<http://www.wordpress.com/2009/04/29/mengungkappenyebab-lambatnya-penyerapan-anggaran-belanja-pemerintah>

- Cooper, D.R. & Emory, C.W. (1995). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Media Global Edukasi
- Cooper, D.R. & Shincdler, P.S. (2006). *Business Research Methods*, International Edition, McGraw-Hill Companies, Inc. New York
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixes* (Edisi ke-3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Keuangan RI (2009). *Penganggaran Berbasis Kinerja*, Jakarta
- Dirjen Anggaran Kemenkeu (2020). *Laporan Realisasi Anggaran APBN dan APBD Tahun 2017-2018*.
- Dirjen Perbendaharaan Negara (2017). *Pedoman Penyerapan Penganggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta: Departemen Keuangan RI
- Dirjen Perbendaharaan Negara (2018). *Kriteria Tingkat Penyerapan Realisasi Anggaran*
- Dirjen Perbendaharaan Negarai (2015). *Pola Ideal Penyerapan Anggaran berdasarkan Karakteristik*, Jakarta.
- Ditjen Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012 tentang Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahap VI. 2012. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta
- Donaldson, L. & Davis, J.H. (1997). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Dwi, I.K. (2011). Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri). *Tesis Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta
- Eka, R.S. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. 4(1): 35-44
- Erlina, S.A. & Muda, I. (2017). The analysis of the influencing factors of budget absorption. *International Journal of Economic Research*, 14 (12):287-300.
- Ferdinand, A. (2006). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Gershon, R. (1999). *Mengukur Kepuasan Pelanggan: Panduan Menciptakan Pelayanan Bermutu*, Penerbit PPM, Jakarta
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, A. dan Kusufi, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A.(2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hasibuan, P.S. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE.
- Heriberta, T. & Yanilia (2018). Analysis of budget spending and its affect on Jambi Government performance. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 5(4): 244-256
- Herriyanto, H. (2010). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian*. Tesis Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta
- Indriantoro dan Supomo (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
- Kuswoyo, I.D. (2011). Analisis atas Faktor-faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran. *Tesis Fakultas Ekonomika dan Bisnis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Leruth, L. dan Paul, E. (2007). A Principal-Agent Theory Approach to Public Expenditure Management System in Developing Countries. *OECD Journal on Budgeting*, 7(3): 1-29.
- Mahmudi (2012). *Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta
- Manasan, R.G. dan Mercado, R.G. (2001). An Assessment of The Absorptive Capacity Of Agencies Involved In The Publik Works Sector. Philippine Institute For Developmen Studies, Discussion Paper Series No. 2001-17. <http://dirp3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps0117.pdf>
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi
- Martoyo, S. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Miliasih, R. (2012). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta
- Mulyamah (2008). *Manajemen Perubahan*. Yudhistira. Jakarta
- Munandar (1999). *Research location is in Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) of Yogyakarta*
- Notoadmodjo (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pusat Kajian Anggaran (2020). *Evaluasi Penyerapan Anggaran APBN dan APBD*, Jakarta
- Romm, C.T., Sudweeks, F. (Eds.) (1998). *Doing business electronically: a global perspective of electronic commerce*, Spring Verlag Press
- Saidi dan Yared (2001). *Implementasi Kebijakan e-Procurement Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi*. Universitas Brawijaya. Malang
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat
- Setiyadi, (2005). *Meningkatkan Profitabilitas dan Cost Saving???e-procurement*. <http://reagansatyawira.blogspot.com/2008/12/e-procurement-meningkatkan.html>.
- Siswanto, A. & Rahayu, S.L. (2010). *Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementrian/Lembaga TA 2010. Policy Paper Pusat Kebijakan APBN*.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (2005). *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua*, Jakarta.
- Subramaniam, W. & Shaw, M. (2004). *Impact of e-Procurement: Experiences From Implementation In The UK Public Sektor*. *Journal of Purchasing & Supply Management* 13, 294-303
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Survey*, Alfabeta, Bandung

- Suhartono (2011). Faktor Penyebab Penyerapan Anggaran di Lembaga Departemen, *Jurnal Sosial & Humaniora*, Vol. 02 (No. 01): 1-15
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang* Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *tentang* Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 *tentang* Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang* Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 *tentang* Pemekaran Daerah
- Witjaksono (2013). Tejari and e-Procurement: Moving to Paperless Business Processes. *Journal of Information Technology Case and Application Research (JITCAR)*, Vol. 10, No.1, pp.52-69
- Yustika, A.E. (2012). *Perekonomian Indonesia: Catatan dari Luar Pagar*. Malang, Bayumedia Publishing
- Zikmund W.G., Babin BJ., Carr J.C & Griffin M., (2010). *Business research Methods, (8th ed)*. SouthWestern: Cengage Learning.